

ISLAM, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN Membaca Berau dalam Perspektif Maqashid Syariah

Ma'rifah Yuliani, Syarifuddin, Wahid Hasyim, Hasnawati, Warti Ratnasari, Diah Riyani

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

¹marifahyuliani@gmail.com, ²syarifstiem2018@gmail.com, ³wahid_hasym@umberau.ac.id,
⁴hasnawati@umberau.ac.id, ⁵warti_ratnasari@umberau.ac.id, ⁶diah_riyani@umberau.ac.id

Article Info

Article history:

Received 01/07/2026

Revised 11/07/2026

Accepted 17/07/2026

Keyword:

maqashid syariah;

kemiskinan;

kesejahteraan; Kabupaten

Berau; *masalah*

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji hubungan antara nilai keagamaan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah* sebagai lensa analisis. Berbeda dari pendekatan kesejahteraan konvensional yang semata mengandalkan indikator moneter, penelitian ini memaknai kesejahteraan sebagai *masalah* —kebaikan menyeluruh yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari *Kabupaten Berau Dalam Angka 2026* terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Berau menurun dari 5,88 persen (2021) menjadi 4,44 persen (2025), diiringi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 76,71 (2023) menjadi 77,72 (2025). Namun demikian, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan justru meningkat pada periode 2017–2022, mengindikasikan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin semakin dalam meskipun jumlahnya menurun. Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk (82,74%) menganut Islam dengan dukungan 302 masjid dan 178 musala yang tersebar di 13 kecamatan, mencerminkan potensi besar instrumen filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf/ZISWAF) sebagai pelengkap kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis negara. Artikel ini berargumen bahwa pembacaan kesejahteraan Berau melalui *maqashid syariah* memberi kerangka yang lebih holistik dan kontekstual dibandingkan dengan pendekatan pembangunan sekuler semata.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kemiskinan senantiasa menjadi persoalan sentral dalam wacana pembangunan, baik dalam kerangka ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam pendekatan konvensional, kemiskinan lazim diukur melalui garis pendapatan atau pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar (Badan Pusat Statistik/BPS, 2026). Namun, ukuran semacam ini kerap dikritik karena mereduksi kesejahteraan hanya pada dimensi material, sementara Islam memandang kesejahteraan (*falah*) sebagai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (Kusmilawaty, Majid, & Harahap, 2024). Kerangka *maqashid syariah* yang dirumuskan Imam Asy-Syatibi menawarkan alternatif penilaian kesejahteraan yang lebih komprehensif, yakni melalui pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami dinamika pembangunan cukup pesat, seiring statusnya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan *Kabupaten Berau Dalam Angka 2026* terbitan BPS Kabupaten Berau (2026), jumlah penduduk Berau pada 2025 tercatat 308.020 jiwa, tumbuh 20,55 persen sejak 2020. Dari sisi keagamaan, penduduk Berau didominasi oleh pemeluk Islam sebesar 82,74 persen, diikuti oleh Kristen Protestan (9,78%), Katolik (7,16%), serta kelompok pemeluk Buddha, Hindu, dan lainnya dalam proporsi kecil. Komposisi ini penting dicermati karena nilai-nilai keagamaan berpotensi menjadi modal sosial dalam strategi pengentasan kemiskinan melalui instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 2026).

Data BPS menunjukkan tren penurunan persentase penduduk miskin Berau dari 5,88 persen (2021) menjadi 4,44 persen (2025). Akan tetapi, penurunan kuantitas penduduk miskin tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas hidup mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,49 (2017) menjadi 0,98 (2022) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,07 menjadi 0,22 pada periode yang sama. Fenomena ini menegaskan pentingnya pembacaan kesejahteraan yang tidak semata-mata berhenti pada angka persentase kemiskinan, melainkan menelaah kedalaman dan tingkat kesenjangan di antara penduduk miskin itu sendiri, sebuah perhatian yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam *maqashid syariah* (Fattah, 2024; Alvia, Efendi, Malihah, & Kurniawan, 2023).

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan kondisi kemiskinan dan kesejahteraan Kabupaten Berau berdasarkan data resmi BPS terkini; (2) menganalisis kondisi tersebut melalui kerangka *maqashid syariah*; dan (3) merumuskan implikasi kebijakan berbasis nilai keislaman yang kontekstual dengan karakteristik sosial-keagamaan masyarakat Berau.

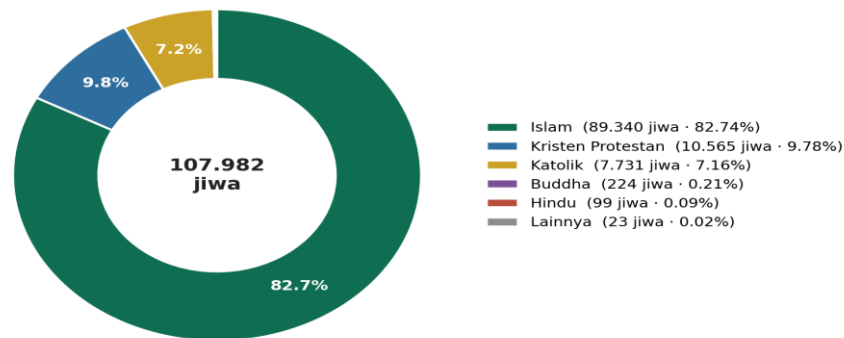
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan strategi studi dokumen (*documentary research*) (Wahyuni & Ardiansyah, 2020). Sumber data primer adalah publikasi resmi *Kabupaten Berau Dalam Angka 2026* Volume 52 terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau yang memuat data kependudukan, kemiskinan, keagamaan, dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017–2025. Data diklasifikasikan ke dalam lima dimensi *maqashid syariah*: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* untuk kemudian dimaknai secara tematik (Auda, 2008; Kusmilawaty et al., 2024). Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data (memilah indikator relevan), penyajian data (visualisasi statistik dan naratif), dan penarikan simpulan (interpretasi berbasis teori *maqashid syariah*). Untuk menjamin keabsahan, seluruh data statistik ditelusuri kembali ke sumber aslinya di dalam publikasi BPS dan disandingkan dengan literatur akademik terkini (2022–2026) sebagai pembanding teoretis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sosial-Keagamaan Kabupaten Berau

Dimensi *hifz al-din* (pemeliharaan agama) tampak nyata dalam struktur demografi Berau. Sebagaimana disajikan pada Gambar 1, dari total 107.982 jiwa penduduk yang tercatat menurut agama pada 2025, sebanyak 89.340 jiwa (82,74%) menganut Islam, 10.565 jiwa (9,78%) Kristen Protestan, 7.731 jiwa (7,16%) Katolik, serta 224 jiwa (0,21%) Buddha, 99 jiwa (0,09%) Hindu, dan 23 jiwa (0,02%) penganut kepercayaan lainnya (BPS Kabupaten Berau, 2026).

Komposisi Penduduk Kabupaten Berau Menurut Agama, 2025

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, dalam BPS Kabupaten Berau (2026)

Gambar 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Berau Menurut Agama, 2025

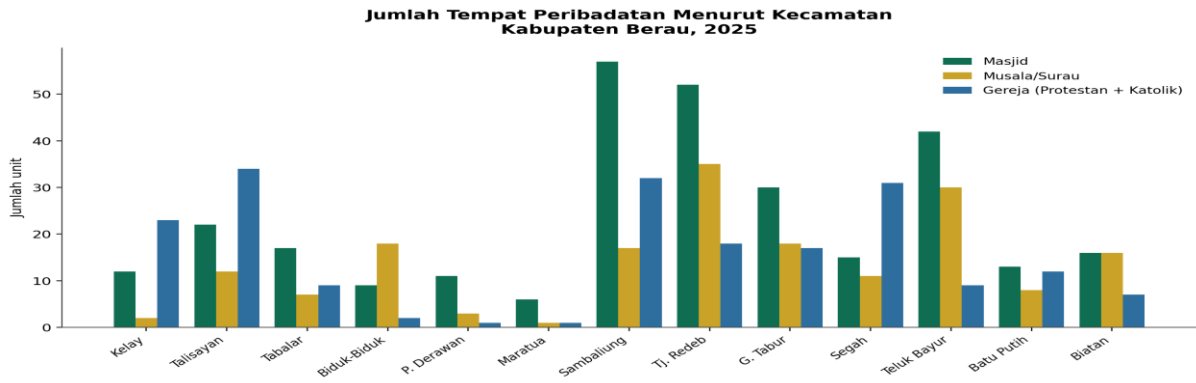
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, dalam BPS Kabupaten Berau (2026).

Dominasi umat Islam ini ditopang oleh infrastruktur peribadatan yang relatif memadai. Tabel 1 menunjukkan sebaran tempat ibadah menurut kecamatan pada 2025, dengan 302 masjid dan 178 musala tersebar di seluruh 13 kecamatan, terkonsentrasi di Kecamatan Sambaliung (57 masjid) dan Tanjung Redeb (52 masjid) sebagai pusat pemerintahan dan permukiman padat (Kementerian Agama Kabupaten Berau, dalam BPS Kabupaten Berau, 2026).

Tabel 1. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau, 2025

Kecamatan	Masjid	Musala	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura/Vihara
Kelay	12	2	16	7	0
Talisayan	22	12	24	10	0
Tabalar	17	7	8	1	0
Biduk-Biduk	9	18	2	0	0
Pulau Derawan	11	3	1	0	0
Maratua	6	1	0	1	0
Sambaliung	57	17	21	11	1
Tanjung Redeb	52	35	17	1	2
Gunung Tabur	30	18	12	5	0
Segah	15	11	18	13	0
Teluk Bayur	42	30	6	3	0
Batu Putih	13	8	11	1	0
Biatan	16	16	6	1	0
Kabupaten Berau	302	178	142	54	3

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Berau, dalam BPS Kabupaten Berau, Kabupaten Berau Dalam Angka 2026.



Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Berau, dalam BPS Kabupaten Berau, Kabupaten Berau Dalam Angka 2026

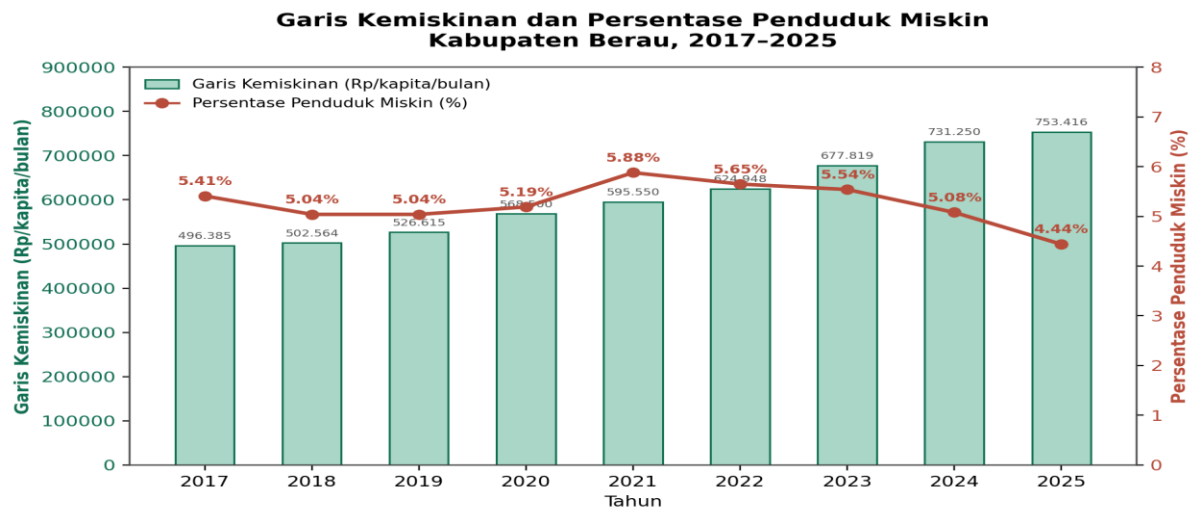
Gambar 2. Sebaran Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan, 2025

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Berau, dalam BPS Kabupaten Berau (2026).

Sebaran tempat ibadah yang relatif merata—meskipun proporsional mengikuti kepadatan penduduk—mengindikasikan bahwa prasyarat institusional bagi pemeliharaan agama (*hifz al-din*) relatif terpenuhi di Berau. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Fattah (2024) bahwa keberadaan infrastruktur keagamaan yang memadai menjadi prasyarat bagi tumbuhnya ekosistem sosial-ekonomi berbasis nilai Islam, termasuk potensi optimalisasi ZISWAF sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berkeadilan (Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 2026).

Dinamika Kemiskinan: Membaca Angka di Balik Persentase

Dimensi *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) tercermin dari data kemiskinan Berau. Sebagaimana disajikan pada Gambar 3, garis kemiskinan Berau meningkat secara konsisten dari Rp496.385 per kapita per bulan (2017) menjadi Rp753.416 per kapita per bulan (2025), sejalan dengan kenaikan biaya hidup. Meski demikian, persentase penduduk miskin justru menunjukkan tren fluktuatif menurun: naik dari 5,41 persen (2017) ke puncaknya 5,88 persen (2021) akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian menurun bertahap menjadi 4,44 persen pada 2025 (BPS Kabupaten Berau, 2026).



Sumber: BPS, Susenas Maret, dalam BPS Kabupaten Berau, Kabupaten Berau Dalam Angka 2026

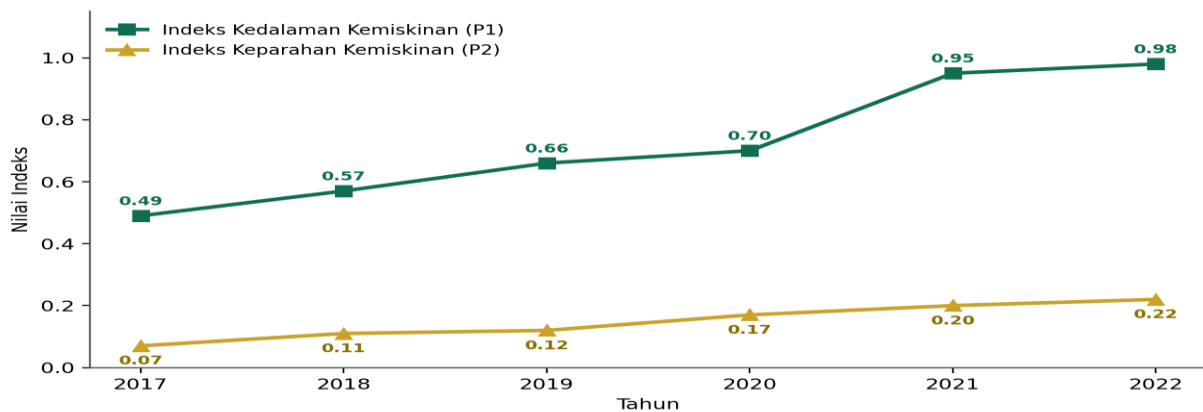
Gambar 3. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau, 2017–2025

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, dalam BPS Kabupaten Berau (2026).

Penurunan persentase penduduk miskin tidak diikuti oleh perbaikan kondisi penduduk yang tersisa di bawah garis kemiskinan. Gambar 4 memperlihatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan meningkat tajam dari 0,49 (2017) menjadi 0,98 (2022). Pola serupa terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2), yang mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, meningkat dari 0,07 menjadi 0,22 pada periode yang sama (BPS Kabupaten Berau, 2026).

Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Berau, 2017-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret, dalam BPS Kabupaten Berau, Kabupaten Berau Dalam Angka 2026

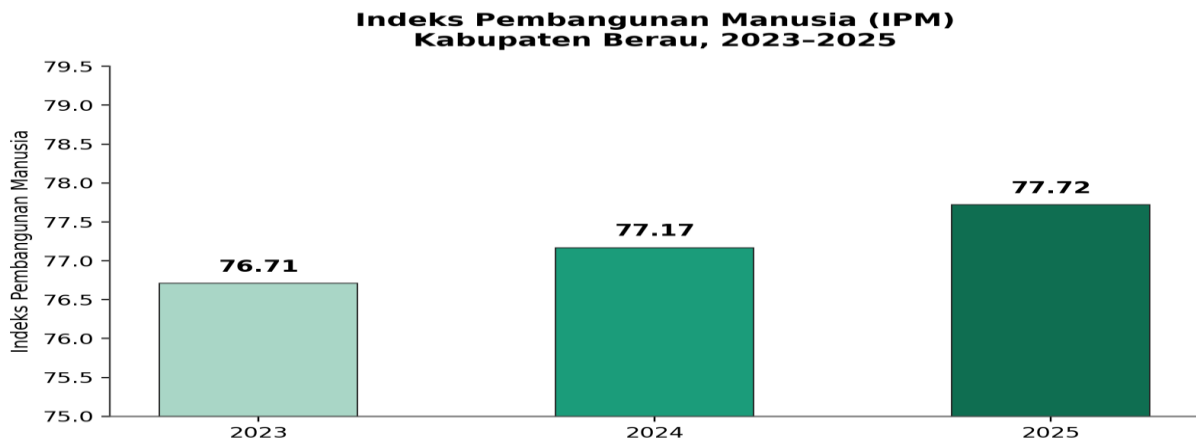
Gambar 4. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Berau, 2017-2022

Sumber: BPS, Susenas Maret, dalam BPS Kabupaten Berau (2026).

Temuan ini selaras dengan peringatan Purbasari dan Hazami (2024) bahwa kemiskinan yang tampak menurun secara agregat dapat menyembunyikan kesenjangan yang semakin dalam pada kelompok termiskin. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini menuntut perhatian lebih pada prinsip keadilan distributif (*al-'adl*), bukan sekadar pengurangan jumlah penduduk miskin secara nominal. Sebagaimana ditegaskan Auda (2008), tujuan syariat bukan hanya menghindarkan kemudaratatan (*daf' al-mafسادah*), tetapi juga mendatangkan kemaslahatan yang merata (*jalb al-maslahah*). Instrumen zakat dan wakaf produktif dapat diarahkan secara afirmatif kepada penduduk dengan kedalaman kemiskinan tertinggi, sejalan dengan temuan Kusmilawaty et al. (2024) bahwa lembaga filantropi Islam berbasis *asset-based community development* efektif menjangkau kelompok termiskin yang sulit disentuh oleh program bantuan konvensional.

Indeks Pembangunan Manusia dan Dimensi Jiwa, Akal, serta Keturunan

Dimensi *hifz al-nafs* (jiwa) dan *hifz al-'aql* (akal) dapat dibaca melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari angka harapan hidup, angka melek huruf/rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita (BPS Kabupaten Berau, 2026). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, IPM Berau meningkat dari 76,71 (2023) menjadi 77,17 (2024) dan 77,72 (2025), menempatkan Berau pada peringkat keempat IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Angka harapan hidup tercatat 73,66 tahun (2024) dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 99,00 persen, indikasi kuat terjaganya dimensi *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* secara institusional.

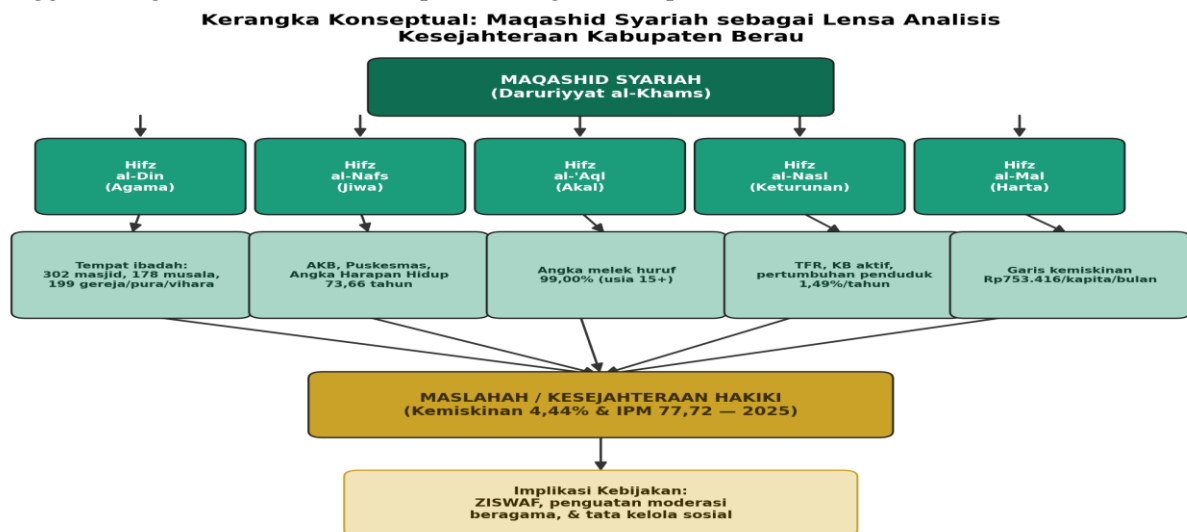


Sumber: BPS, Seri Berita Resmi Statistik IPM, dalam BPS Kabupaten Berau, Kabupaten Berau Dalam Angka 2026

Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau, 2023–2025

Sumber: BPS, Seri Berita Resmi Statistik IPM, dalam BPS Kabupaten Berau (2026).

Sementara itu, dimensi *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) tampak dari laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pada 2025 dan program Keluarga Berencana yang terus berjalan di tingkat kecamatan. Kombinasi kelima dimensi ini—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—membentuk kerangka evaluatif yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan indikator kemiskinan tunggal, sebagaimana diilustrasikan pada kerangka konseptual Gambar 6.



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi dan data BPS Kabupaten Berau (2026)

**Gambar 6. Kerangka Konseptual Maqashid Syariah sebagai Lensa Analisis Kesejahteraan
Kabupaten Berau**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi dan data BPS Kabupaten Berau (2026).

Ringkasan Statistik Kunci

Tabel 2 merangkum indikator kunci kesejahteraan Kabupaten Berau tahun 2023–2025 yang menjadi dasar analisis *maqashid syariah* dalam artikel ini.

Tabel 2. Statistik Kunci Sosial-Ekonomi Kabupaten Berau, 2023–2025

Indikator	2023	2024	2025
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	258,29	299,00	308,02

Indikator	2023	2024	2025
Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,43	1,71	1,49
Angka melek huruf usia 15+ (%)	99,00	99,00	n/a
Angka harapan hidup (tahun)	73,45	73,66	n/a
Penduduk miskin (ribu jiwa)	13,26	12,35	10,96
Persentase penduduk miskin (%)	5,54	5,08	4,44
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,71	77,17	77,72

Sumber: BPS Kabupaten Berau, Kabupaten Berau Dalam Angka 2026 (diolah).

Implikasi: Sinergi Negara dan Filantropi Islam

Pembacaan data Berau melalui *maqashid syariah* menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penurunan persentase kemiskinan semata, tetapi harus memperhatikan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dialami kelompok termiskin. Mengingat dominasi penduduk Muslim (82,74%) dan tersedianya 302 masjid sebagai simpul sosial-keagamaan, optimalisasi ZISWAF melalui lembaga amil zakat berbasis masjid berpotensi menjadi pelengkap strategis bagi program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah (Fattah, 2024; Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 2026). Selain itu, moderasi beragama perlu terus dijaga mengingat keragaman agama di Berau, agar dimensi *hifz al-din* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan mayoritas, melainkan juga penghormatan terhadap kemajemukan sebagai bagian dari kemaslahatan bersama (Dusuki & Abdullah, 2021, dikutip dalam Sinergi Maqashid Syariah dan SDGs, 2025).

Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa kesejahteraan Kabupaten Berau, bila dibaca melalui kerangka *maqashid syariah*, menampilkan gambaran yang lebih kaya dibandingkan sekadar angka kemiskinan agregat. Meskipun persentase penduduk miskin menurun dari 5,88 persen (2021) menjadi 4,44 persen (2025) dan IPM meningkat menjadi 77,72 (2025), Indeks Kedalaman dan Keparahannya yang meningkat pada periode 2017–2022 mengindikasikan kesenjangan yang semakin dalam di kalangan penduduk termiskin. Struktur sosial-keagamaan Berau yang didominasi umat Islam (82,74%) dengan dukungan 302 masjid dan 178 musala menghadirkan potensi besar bagi optimalisasi instrumen filantropi Islam sebagai pelengkap kebijakan negara. Riset lanjutan disarankan untuk mengukur secara kuantitatif kontribusi ZISWAF terhadap penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Berau, guna memperkuat argumen normatif yang dibangun dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alvia, D. O., Efendi, I. W., Malihah, K. P., & Kurniawan, M. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014–2023. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 1–14.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau. (2026). *Kabupaten Berau Dalam Angka 2026* (Berau Regency in Figures 2026), Volume 52. Tanjung Redeb: BPS-Statistics of Berau Regency.

- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 194–208.
- Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi. (2026). Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Maqashid Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 3(3), 1–8.
- Kusmilawaty, Majid, M. S., & Harahap, I. (2024). Realisasi Maqashid Syariah pada Lembaga Filantropi Islam (Pengentasan Kemiskinan melalui BUMMas: Asset-Based Community Development Approach). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3043–3051. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15022>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Asy-Syatibi, Al-Ghazali, dan Ibn Asyur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(2), 1–15.
- Purbasari, R., & Hazami, B. (2024). Integrasi Maqashid Syariah dalam Indeks Pembangunan Ekonomi: Studi terhadap Kesenjangan Sosial. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 16(1), 65–80.
- Sinergi Maqashid Syariah dan SDGs: Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam. (2025). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 210–225.
- Wahyuni, S., & Ardiansyah, R. (2020). Metode Studi Pustaka dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 8(2), 45–56.